



HULONDALO

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI

Available online <https://ejournal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Ketahanan Pangan di Kabupaten Pohuwato

Strategy for Regional Poverty Alleviation Based on Food Security in Pohuwato Regency

Rusli¹, Irmawati², Saharuddin³, Imran Kamaruddin^{4*}

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Timur, Indonesia¹,

Prodi Agroteknologi, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia,

Prodi Hukum Bisnis, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia³

Prodi manajemen, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia^{4*}

*Corresponding Autor Email: imrankamaruddin1973@gmail.com**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pohuwato yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kelima secara nasional pada tahun 2022. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan, hasilnya belum optimal. Pendekatan ketahanan pangan menjadi strategi yang potensial dalam mengatasi kemiskinan karena berperan dalam menekan pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan berbasis ketahanan pangan di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan kajian kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan, peningkatan produktivitas padi, serta akses terhadap pangan bergizi memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, masih terdapat tantangan seperti fluktuasi harga pangan, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta rendahnya daya beli masyarakat miskin. Strategi yang direkomendasikan dalam penelitian ini mencakup peningkatan efisiensi distribusi pangan, diversifikasi sumber pangan lokal, serta penguatan kapasitas petani dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan guna mendukung percepatan pengurangan kemiskinan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Kemiskinan; Kebijakan Pangan; Kabupaten Pohuwato; Strategi Pembangunan.

ABSTRACT

Poverty remains a major challenge in regional development, including in Pohuwato Regency, which ranked as the fifth-highest poverty rate nationally in 2022. Despite

various poverty alleviation programs being implemented, the results have not been optimal. A food security approach presents a potential strategy to address poverty by reducing household expenditures, increasing community income, and creating employment opportunities in the agriculture and fisheries sectors. This study aims to analyze poverty alleviation strategies based on food security in Pohuwato Regency. The research method involves secondary data analysis from the Central Bureau of Statistics and a review of relevant policies. The findings indicate that food price stability, increased rice productivity, and access to nutritious food significantly impact poverty reduction. However, challenges such as food price fluctuations, limited distribution infrastructure, and low purchasing power among the poor persist. The study recommends strategies such as improving food distribution efficiency, diversifying local food sources, and strengthening the capacity of farmers and small-scale food entrepreneurs. Synergy between local governments, communities, and the private sector is essential to enhance sustainable food security and accelerate poverty reduction efforts.

Keywords: *Food Security; Poverty; Food Policy; Pohuwato Regency; Development Strategy.*

I. PENDAHULUAN

Tantangan terberat yang hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam pembangunan ekonomi, yakni kemiskinan. Malahan Kabupaten Pohuwato merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kelima secara nasional, sebesar 15,42 persen di tahun 2022. Kendati persentase ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi penurunannya makin kecil. Kondisi serupa dialami oleh Kabupaten Pohuwato, diawal berdiri sendiri menjadi daerah otonom angka kemiskinan (P0) sekitar 32 persen, menurun menjadi sebesar 17,64 persen di tahun 2023. Sekalipun menurun drastis dibanding 20 tahun lampau, angka tersebut masih terhitung tinggi apalagi kondisi kemiskinan di Kabupaten Pohuwato hanya lebih baik dari Kabupaten Boalemo, padahal SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato paling besar dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato bahkan di Kawasan Teluk Tomini. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, jelas memberikan hasil. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dimana angka kemiskinan masih menjadi hambatan dalam proses percepatan pembangunan. Apalagi tenaga kerja menurut lapangan usaha masih didominasi di sektor primer (pertanian) minim nilai tambah, yakni 43,53 persen dari total penduduk yang bekerja, sebagian besar diantara mereka merupakan petani penggarap. Selain karena terbatasnya peluang kerja di sektor non pertanian, tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi lulusan SD ke bawah, rata-rata jam kerjanya pun sangat rendah di bawah 35+ jam per minggu, hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas terbatas, berdampak terhadap rendahnya pendapatan. (RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025-2045).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari perencanaan wilayah tentunya membutuhkan dasar studi ilmiah dengan menggunakan analisis yang tepat untuk dapat kemudian merencanakan tindakan maupun aksi penanggulangan

kemiskinan yang nyata. Upaya penanggulangan kemiskinan daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yakni Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Pada tahun 2020 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Kemudian dipertegas dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Amanat yang tertuang dalam kebijakan ini perlu dilanjutkan pada level kabupaten/kota, dalam hal ini Kabuapten Pohuwato untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang ada.

Diperlukan kajian lebih mendalam, bahwa meskipun telah banyak program dan kebijakan digulirkan (strategi struktural) dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit, penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan hasil yang optimal. Wajah kemiskinan yang dipengaruhi oleh banyak faktor (multidimensional), sangat dimungkinkan karena sebab-sebab kultural (strategi budaya) masih menjadi salah satu bagian dari hambatan penanggulangan kemiskinan.

Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini dinilai masih banyak kekurangan, diantaranya: pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek lain kemiskinan multidimensional; kedua, lebih bernuansa karitatif (bantuan sosial) daripada produktivitas; ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek; keempat, pemerintah masih sebagai penguasa (program terpusat yang seragam) dari pada fasilitator. Wajah kemiskinan yang multidimensional memerlukan pendekatan yang seimbang antara ekonomi dan non ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun perlu juga mengatasi kemiskinan dari faktor non-ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada mengikis nilai-nilai budaya yang negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, merasa tidak berdaya, dan lain-lain (Huraerah, 2005).

Penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam dan akurat untuk merumuskan strategi terbaik, yang diawali dengan mengenali secara mendalam karakter dasar masyarakat dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Penyamaan persepsi yang tepat tentang konsep, indikator serta target prioritas penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Kajian-kajian tentang penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, di antaranya banyak menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dari sudut pandang struktural. Pembangunan ekonomi yang tidak adil membawa dampak pada kemiskinan dan kesenjangan yang parah, di mana kebijakan pemerintah tidak berpihak pada si miskin (Syawie, 2011). Hal ini erat kaitannya dengan sebagian besar program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang tidak begitu berhasil karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana mereka (Prawoto,

2009). Sementara pemberdayaan masyarakat miskin dirasakan belum berjalan dengan baik untuk mengentaskan masyarakat miskin karena desain program yang kurang tajam (Sutikno et al, 2015).

Ketahanan pangan merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memainkan peran strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Kemiskinan sering kali berhubungan erat dengan keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan yang baik tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil, buruh tani, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan ketahanan pangan menjadi salah satu strategi yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, penguatan sistem pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan stabilitas harga pangan, sehingga masyarakat miskin tidak mudah terdampak oleh fluktuasi harga di pasar.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan, seperti program bantuan pangan non-tunai (BPNT), lumbung pangan desa, dan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal distribusi, aksesibilitas, dan keberlanjutan produksi pangan di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pendekatan ketahanan pangan dapat menjadi solusi efektif dalam penanggulangan kemiskinan daerah, serta menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Beberapa pertanyaan penting dalam mendalami kemiskinan di suatu wilayah antara lain: Bagaimana karakteristik rumah tangga miskin? Bagaimana kondisi kemiskinan yang ada apakah sementara atau tetap? Bagaimana pola dan perubahan kemiskinan? Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek longitudinal/panel yang lebih luas dari profil kemiskinan - aliran pendapatan seumur hidup, posisi anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, kecukupan tabungan, jenis kelamin; dll. Selain itu, penting menggunakan sumber data gabungan untuk penilaian kemiskinan - menggabungkan survei rumah tangga dan sensus penduduk untuk menyusun peta kemiskinan agar profil, karakteristik dan permasalahan kemiskinan dapat dijabarkan secara jelas untuk kemudian dicari upaya-upaya (kebijakan) penanggulangan kemiskinan yang sesuai.

II. METODE PENELITIAN

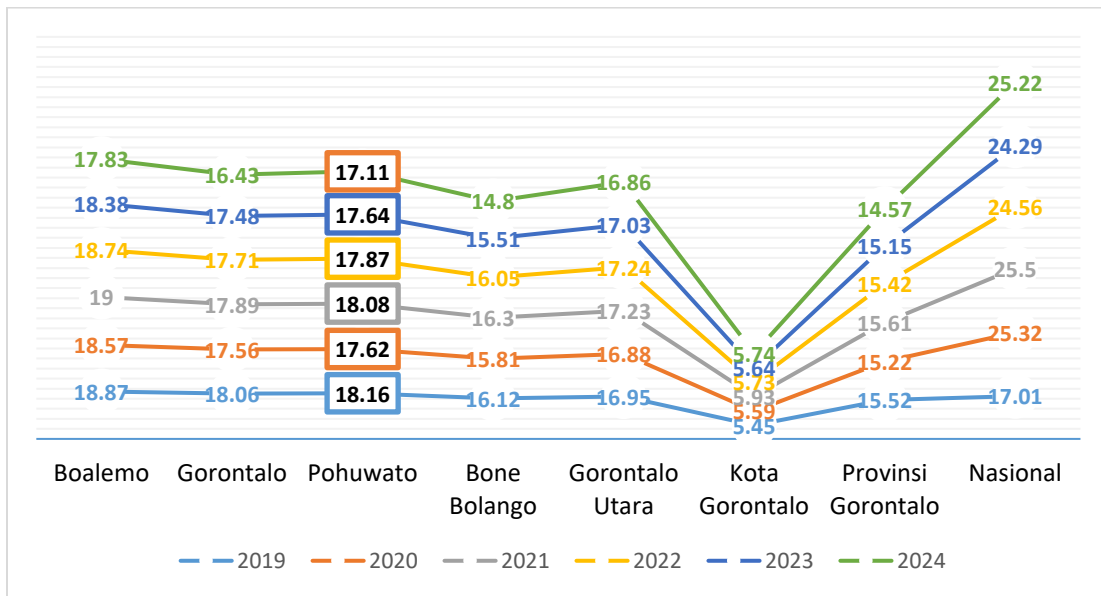
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan Statistik Deskriptif yang bersumber dari Data statistik dari BPS Kabupaten Pohuwato (persentase kemiskinan, harga pangan, produktivitas padi) dengan tujuan menggambarkan tren kemiskinan, harga pangan, dan produktivitas pertanian di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2019–2024.

Sedangkan data kualitatif didasarkan pada hasil FGD dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pohuwato, camat, dan desa serta data laporan kebijakan pemerintah, dan kajian akademik terkait ketahanan pangan dan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Data ini bertujuan untuk memahami strategi penanggulangan kemiskinan berbasis ketahanan pangan dengan melihat kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pohuwato. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana ketahanan pangan dapat menjadi strategi pengentasan kemiskinan serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang konkret.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato

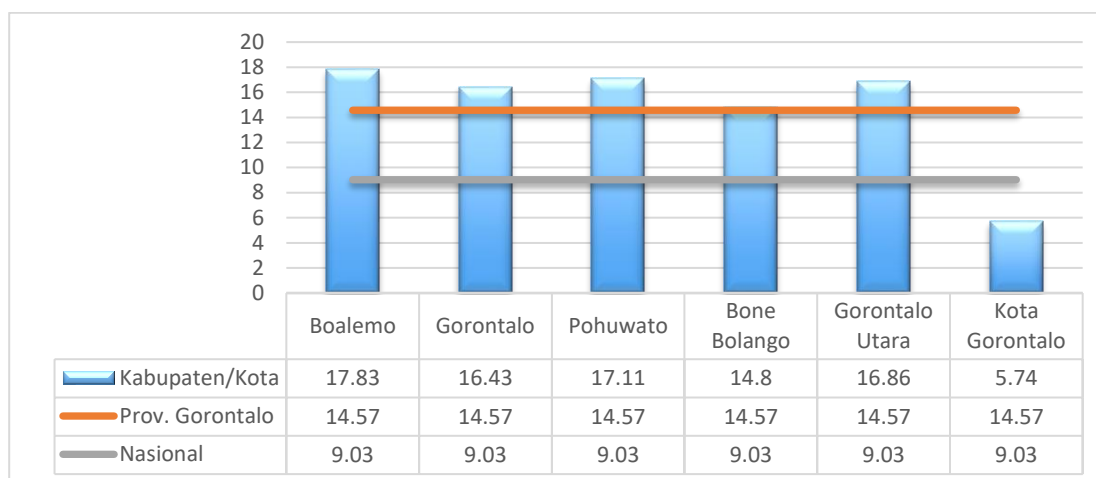
Pengumpulan data tentang jumlah dan persentase penduduk miskin memiliki berbagai tujuan strategis yang penting untuk mendukung perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan public, terutama kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pohuwato tahun 2024, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pohuwato dari lima tahun terakhir (2019-2024) mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di tahun 2019 mencapai 18,08% kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Sampai pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di kabupaten Pohuwato sebesar 17,11% diperlihatkan pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Kabupaten Pohuwato , 2024

Jika dibandingkan dengan kabupate/kota lain yang ada di Provinsi Gorontalo, tingkat kemiskinan Kabupaten Pohuwato menduduki peringkat kelima dari enam kabupaten/kota. Kabupaten Boalemo menduduk peringkat pertama tingkat

kemiskinan tertinggi pada tahun 2024 dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,83%, kemudian disusul oleh kabupaten Pohuwato mencapai 17,11%, Kota Gorontalo menduduk urutan pertama tingkat kemiskinan terendah yaitu 5,74% seperti yang ada pada Gambar 2.



Gambar 2. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabuapten Pohuwato Tahun 2019-2024

Sumber : BPS Kabupaten Pohuwato , 2024

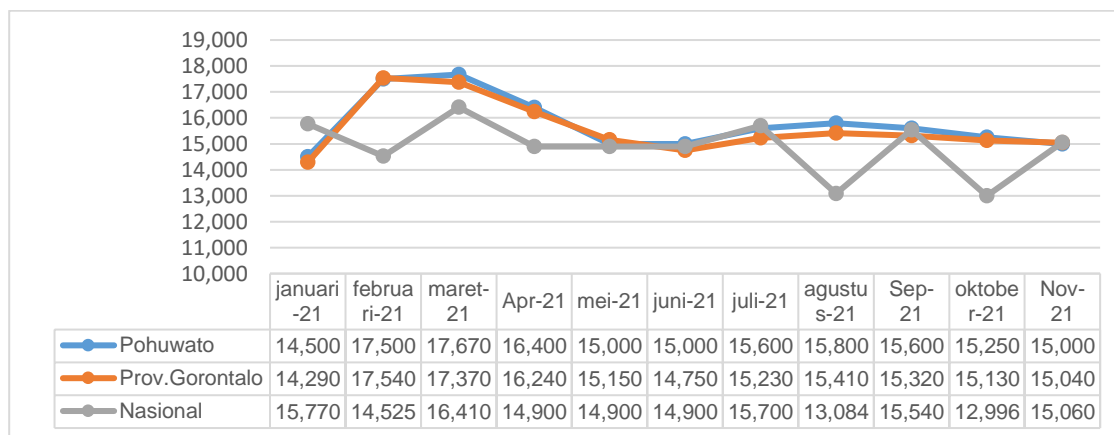
Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pohuwato pada periode tahun 2019–2024 mengalami trend fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 2,17 persen poin dibandingkan tahun 2017. Kemudian, pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode tahun 2020–2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Meskipun demikian, setelah tahun 2023, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan periode tahun 2019–2024 disajikan pada Gambar 3.3. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2024 mencapai 28,93 ribu orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 460 orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 17,11 persen, menurun 0,53 persen poin terhadap tahun 2023.

Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Ketahanan Pangan Perkembangan Harga Beras

Harga beras dalam konteks ketahanan pangan dan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting. Harga beras sebagai komoditas pangan utama di banyak negara, termasuk Indonesia, sangat memengaruhi kestabilan ketahanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan harga beras di Indonesia relatif tidak stabil. Kenaikan dan penurunan harga dipengaruhi oleh harga secara umum atau inflasi. Perkembangan harga beras di Indonesia dan di Kabupaten Pohuwato secara khusus sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi beras, di sisi lain adanya konversi lahan pertanian menjadi

permukiman atau industri lain menyebabkan luas lahan pertanian akan menjadi berkurang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi yang berkurang akan mempengaruhi stok beras dan harga beras. Adapun kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga beras akan berdampak terhadap upaya untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah, sebab kenaikan harga beras memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyumbang inflasi

Berdasarkan data harga beras premium di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan tingkat nasional pada tahun 2021, harga beras premium di Pohuwato menunjukkan fluktuasi yang cukup sebanding dengan harga beras di tingkat provinsi dan nasional diperlihatkan pada Gambar 3. Pada Januari 2021, harga beras premium di Pohuwato adalah Rp 14.500 per kilogram, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan harga di Provinsi Gorontalo (Rp 14.290) dan harga nasional yang lebih tinggi (Rp 15.770). Selama bulan-bulan berikutnya, harga beras di Pohuwato menunjukkan tren yang mengikuti fluktuasi serupa dengan harga beras di tingkat provinsi dan nasional, meskipun ada beberapa perbedaan. Misalnya, pada Februari 2021, harga beras di Pohuwato mencapai Rp 17.500 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan dengan harga di Provinsi Gorontalo (Rp 17.540) dan lebih rendah daripada harga nasional yang mencapai Rp 14.525. Pada bulan-bulan berikutnya, harga di Pohuwato cenderung lebih stabil dan sebanding dengan harga di provinsi dan nasional, meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil dalam harga yang disebabkan oleh faktor lokal dan regional. Secara keseluruhan, relevansi harga beras premium di Kabupaten Pohuwato dengan harga di Provinsi Gorontalo dan nasional menunjukkan bahwa harga beras di Pohuwato cukup mengikuti tren umum, meskipun sering kali sedikit lebih rendah atau sebanding dengan harga yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional.



Gambar 3. Harga Beras (Kg/Rp) Kabupaten Pohuwato, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Pada Tahun 2021

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2021

Peran dan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait dengan harga beras, sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga miskin. Berdasarkan data harga beras premium di Kabupaten Pohuwato, harga beras di daerah tersebut cenderung mengikuti fluktuasi harga yang terjadi di

tingkat provinsi dan nasional, meskipun dengan beberapa perbedaan kecil. Pemerintah memiliki beberapa peran kunci dalam mengatasi dampak fluktuasi harga beras terhadap kemiskinan di daerah ini, antara lain:

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga beras di pasar. Fluktuasi harga beras yang signifikan, seperti yang terlihat pada Januari hingga Februari 2021, dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Upaya pemerintah seperti subsidi harga beras atau pengaturan harga beras melalui kebijakan pengendalian harga pangan dapat membantu mengurangi dampak negatif fluktuasi harga ini. Untuk mengurangi ketergantungan pada harga beras impor dan meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah dapat berfokus pada peningkatan produksi padi lokal. Program-program seperti penyuluhan pertanian, penyediaan bibit unggul, dan bantuan teknologi pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya produksi dan memengaruhi harga beras secara positif. Dalam menghadapi fluktuasi harga beras, pemerintah dapat mengelola cadangan pangan nasional atau daerah untuk mengantisipasi kelangkaan atau lonjakan harga. Penyediaan cadangan pangan ini dapat menjadi alat untuk menstabilkan harga beras di pasar lokal, menjaga ketersediaan pangan, dan melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga yang tajam.

Untuk keluarga miskin yang sangat terpengaruh oleh kenaikan harga beras, pemerintah dapat memperkenalkan program bantuan pangan atau subsidi langsung yang membantu mereka mengakses pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Program seperti Rastra (Beras Sejahtera) atau bantuan pangan lainnya dapat menjadi solusi sementara untuk memastikan ketersediaan pangan bagi rumah tangga miskin.

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan beras dapat sampai ke daerah-daerah terpencil dengan harga yang wajar. Penyederhanaan rantai distribusi dan pengurangan biaya logistik dapat membantu menurunkan harga beras di tingkat konsumen dan meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat miskin. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Pohuwato dengan menciptakan peluang usaha di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Program pemberdayaan petani lokal, penyediaan modal usaha, serta akses pasar yang lebih baik untuk produk pangan lokal dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kestabilan harga beras.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengendalian harga beras sangat berkaitan dengan kebijakan yang mengutamakan stabilitas harga pangan, peningkatan produksi dalam negeri, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya keluarga miskin. Dengan kebijakan yang tepat, fluktuasi harga beras dapat diminimalkan, membantu masyarakat miskin untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

Berikut adalah matriks perkembangan harga beras premium di Kabupaten Pohuwato berdasarkan aspek posisi relatif, time series, efektivitas, dan relevansi, disertai dengan penjelasan aspek, indikator, dan implikasi kebijakan diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan harga beras premium Kabupaten Pohuwato

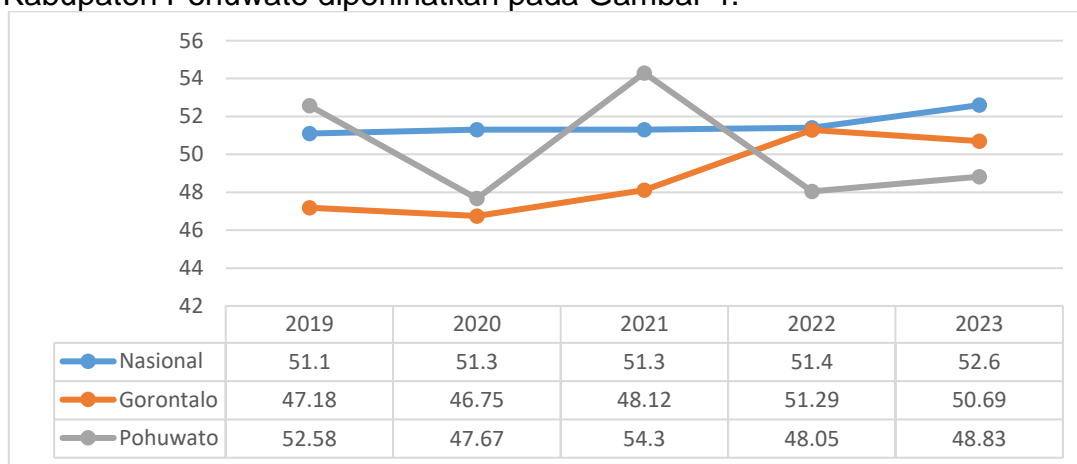
Aspek	Indikator	Penjelasan	Implikasi Kebijakan
Posisi Relatif	Perbandingan harga beras premium di Kabupaten Pohuwato dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo dan nasional pada 2024.	Harga beras premium di Pohuwato sebesar Rp 15.000/kg, relatif stabil dan serupa dengan daerah lain di provinsi, seperti Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo, tetapi lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (Rp 15.060/kg).	Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga melalui pengaturan distribusi dan memastikan stok beras mencukupi untuk mencegah disparitas harga yang lebih besar.
Time Series	Tren harga beras premium dari tahun 2019 hingga 2024, serta fluktuasi bulanan pada tahun 2021.	Harga beras premium di Pohuwato mengalami kenaikan dari Rp 10.381/kg (2019) menjadi Rp 15.000/kg (2024). Pada 2021, harga beras menunjukkan fluktuasi signifikan di awal tahun, tetapi stabil di angka Rp 15.000/kg pada paruh kedua tahun.	Pemerintah dapat memperkuat manajemen cadangan pangan dan meningkatkan kapasitas logistik untuk mengatasi lonjakan harga musiman, serta menjaga tren kenaikan harga tetap terkendali.
Efektivitas	Stabilitas harga beras premium meskipun terdapat lonjakan harga dari tahun ke tahun.	Kenaikan harga yang signifikan dari Rp 10.381/kg (2019) ke Rp 15.000/kg (2024) mencerminkan pengaruh inflasi dan gangguan pasokan, tetapi stabilitas harga di tahun terakhir menunjukkan efektivitas pengendalian oleh pemerintah daerah.	Kebijakan subsidi, intervensi pasar, dan pengawasan distribusi perlu dilanjutkan untuk menjaga kestabilan harga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Relevansi	Keterkaitan harga beras di Kabupaten Pohuwato dengan harga di tingkat provinsi dan nasional.	Harga beras premium di Pohuwato cenderung mengikuti tren harga di tingkat provinsi dan nasional, meskipun sering kali lebih rendah, mencerminkan relevansi pasar lokal terhadap	Pemerintah daerah perlu menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk program subsidi dan pengendalian harga, untuk menjaga daya

Aspek	Indikator	Penjelasan	Implikasi Kebijakan
		dinamika pasar yang lebih luas.	beli masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber: Hasil Olahan Data Primer dan Sekunder, 2024

Produktivitas Padi

Sektor pertanian merupakan penunjang utama masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan Negara agraris. Penyediaan pangan bagi penduduk di Indonesia yang selalu bertambah memerlukan upaya nyata peningkatan produksi padi. Sebagian besar petani di Indonesia mengusahakan padi dengan program intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya rata-rata produktivitas padi per hektar antara lain kesuburan tanah, pemakaian pupuk, bibit, cara bercocok tanam, jasad pengganggu dan sebagainya. Adapun aspek anomali seperti kelembaban dan curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Berikut ini kondisi produktivitas padi Kabupaten Pohuwato diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Capaian Produktivitas Padi (kw/ha) Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Pohuwato, 2024

Berdasarkan data produktivitas padi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan nasional dari 2019 hingga 2023, relevansi produktivitas padi di Pohuwato menunjukkan hasil yang cukup kompetitif meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, produktivitas padi di Pohuwato sebesar 52,58 kw/ha lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas di Provinsi Gorontalo yang tercatat 47,18 kw/ha, namun sedikit lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 51,1 kw/ha. Pada 2020, produktivitas Pohuwato turun menjadi 47,67 kw/ha, sementara produktivitas Provinsi Gorontalo dan nasional mengalami penurunan yang lebih kecil. Pada 2021, produktivitas padi di Pohuwato meningkat menjadi 54,3 kw/ha, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gorontalo yang hanya 48,12 kw/ha, serta lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 51,3 kw/ha. Namun, pada 2022 dan 2023, produktivitas di Pohuwato kembali mengalami penurunan menjadi 48,05 kw/ha dan 48,83 kw/ha, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Gorontalo yang

mengalami sedikit peningkatan dan masih berada di bawah angka nasional yang terus meningkat menjadi 52,6 kw/ha pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, relevansi produktivitas padi di Pohuwato menunjukkan bahwa Kabupaten ini memiliki hasil yang cukup kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain di Gorontalo dan rata-rata nasional, meskipun tantangan tetap ada dalam mempertahankan atau meningkatkan hasil pertanian secara konsisten.

Data produktivitas pada Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023 berdasarkan pada tiga aspek (aspek posisi relatif, time series, efektivitas, dan relevansi), maka implikasi kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Implikasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari aspek Produktivitas Padi Kabupaten Pohuwato

Aspek	Indikator	Penjelasan	Implikasi Kebijakan
Posisi Relatif	Perbandingan produktivitas padi Kabupaten Pohuwato dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo dan nasional dari tahun 2019 hingga 2023.	Produktivitas padi di Pohuwato cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo (seperti Bone Bolango dan Gorontalo Utara) dan mendekati atau melampaui rata-rata nasional, terutama pada 2019 dan 2021.	Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pertanian dengan fokus pada teknologi budidaya dan pengelolaan lahan agar posisi relatif tetap kompetitif dibandingkan daerah lain.
Time Series	Tren produktivitas padi dari tahun 2019 hingga 2023.	Produktivitas menunjukkan fluktuasi: naik signifikan pada 2021 (54,3 kw/ha), tetapi menurun pada 2022 dan 2023 menjadi 48,05 kw/ha dan 48,83 kw/ha. Faktor eksternal seperti iklim dan input pertanian memengaruhi hasil produksi.	Kebijakan mitigasi risiko cuaca, penguatan akses petani terhadap input pertanian berkualitas, dan pelatihan teknis diperlukan untuk menjaga stabilitas produktivitas dari tahun ke tahun.
Efektivitas	Kemampuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas padi dari waktu ke waktu.	Meskipun ada perbaikan signifikan pada 2021, produktivitas belum kembali ke level tertinggi dan tetap fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan terkait efektivitas pengelolaan	Pemerintah perlu memperkuat program irigasi, subsidi pupuk, serta diversifikasi varietas padi untuk meningkatkan efektivitas

Aspek	Indikator	Penjelasan	Implikasi Kebijakan
		pertanian perlu terus diperbaiki.	pengelolaan pertanian dan mengurangi ketergantungan pada kondisi eksternal.
Relevansi	Kesesuaian produktivitas padi di Pohuwato dengan produktivitas tingkat provinsi dan nasional.	Produktivitas padi di Pohuwato cenderung sejalan dengan produktivitas provinsi dan nasional, meskipun sempat melampaui keduanya pada 2021 (54,3 kw/ha). Namun, penurunan pada 2022-2023 menunjukkan adanya tantangan untuk mempertahankan relevansi.	Kebijakan daerah harus terintegrasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk penguatan sektor pendukung seperti akses pembiayaan dan pemasaran hasil pertanian.

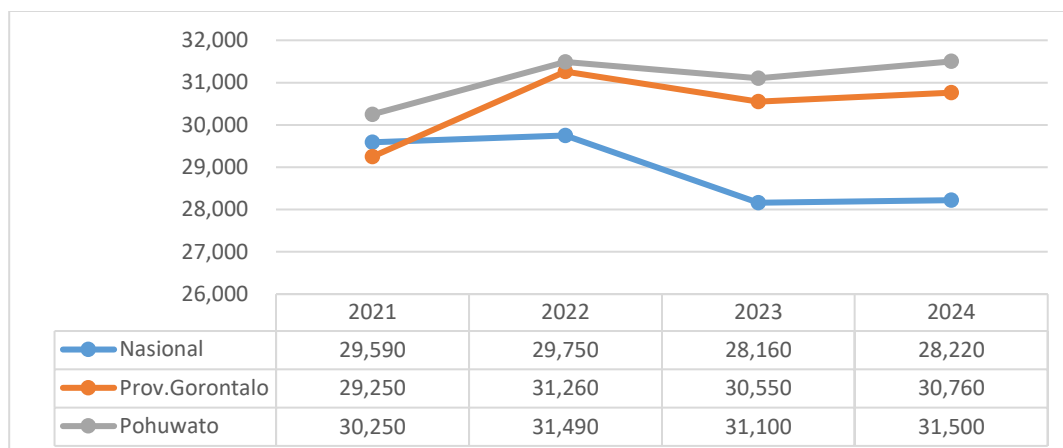
Sumber: Hasil Olahan Data primer dan Sekunder, 2024

Data produktivitas padi Kabupaten Pohuwato dari aspek posisi relative menunjukkan kekuatan kompetitif Pohuwato dibandingkan daerah lain di Provinsi Gorontalo dan nasional. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian padi di Pohuwato memiliki potensi yang baik tetapi tetap memerlukan penguatan. Data ini memperlihatkan tren perubahan produktivitas dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau tantangan yang muncul, seperti pengaruh iklim, sarana produksi, dan kebijakan yang diterapkan. Upaya yang perlu dilakukan adalah pertama perlunya mengadopsi teknologi modern, seperti penggunaan varietas padi unggul dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Kedua adalah mengembangkan kebijakan yang tanggap terhadap dampak cuaca buruk, termasuk asuransi pertanian dan manajemen risiko cuaca. Dan ketiga adalah memperkuat integrasi kebijakan pertanian lokal dengan inisiatif tingkat provinsi dan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi. Serta memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian terkini dan pengelolaan usaha tani untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka.

Harga Telur Ayam Ras

Telur ayam ras saat ini masih mendominasi pasar konvensional. Selama bertahun-tahun penyajian telur di pasar konvensional tidak mengalami perubahan yaitu dalam bentuk curah. Bentuk telur ayam ras spesifik yang dikemas dalam kotak plastik ataupun dikemas dengan penambahan vitamin dan mineral masih jarang terlihat di pasar konvensional. Umumnya telur ayam ras petelur dijadikan bahan industri atau komoditas ekspor, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam konsumsi telur dari ayam ras petelur. Berikut ini posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi harga telur ayam ras di Kabupaten Pohuwato.

Perkembangan harga telur ayam di Kabupaten Pohuwato selama empat tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, yang mencerminkan dinamika pasar lokal dengan pola serupa di kabupaten/kota lain, provinsi, dan nasional. Pada tahun 2021, harga telur di Pohuwato mencapai Rp30.250, meningkat menjadi Rp31.490 pada tahun 2022. Harga kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi Rp31.100, namun kembali naik di tahun 2024 menjadi Rp31.500. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, seperti Kota Gorontalo dan Bone Bolango, harga telur di Pohuwato konsisten berada di tingkat menengah hingga atas diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Relevansi Telur Ayam Ras (Rp/1 kg) Kabupaten Pohuwato, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Pada Tahun 2024 Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Harga di Pohuwato juga cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp30.760, serta jauh di atas rata-rata nasional sebesar Rp28.220. Meski tidak setinggi Kabupaten Boalemo yang mencatat Rp39.560, harga telur di Pohuwato tetap menjadi salah satu yang signifikan di wilayah Gorontalo.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato menghadapi tantangan dalam menjaga keterjangkauan harga telur bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti biaya transportasi, ketergantungan pada pasokan eksternal, dan efisiensi distribusi lokal perlu ditinjau ulang untuk menekan fluktuasi harga. Langkah-langkah peningkatan produksi lokal dan stabilisasi rantai pasok dapat menjadi strategi yang relevan untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berikut ini Tabel 3 adalah matriks analisis Perkembangan Harga Telur Ayam Ras di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 3. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras di Kabupaten Pohuwato

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
Posisi Relatif	Mengukur posisi harga telur ayam ras di Kabupaten Pohuwato	- Harga telur Pohuwato 2024: Rp31.500/kg - Rata-rata	- Tingkatkan efisiensi rantai pasok untuk menekan harga. - Dorong produksi

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
	dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo dan nasional.	provinsi Gorontalo: Rp30.760/kg - Rata-rata nasional: Rp28.220/kg - Harga tertinggi: Boalemo (Rp39.560/kg)	lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. - Subsidi transportasi untuk daerah dengan harga lebih tinggi.
Perkembangan Time Series	Memantau perubahan harga telur ayam ras selama lima tahun terakhir untuk mengidentifikasi tren dan faktor penyebab fluktuasi harga.	- 2021: Rp30.250/kg - 2022: Rp31.490/kg - 2023: Rp31.100/kg - 2024: Rp31.500/kg - Tren fluktuatif, cenderung meningkat.	- Stabilkan harga melalui regulasi pasokan dan subsidi harga produksi. - Perkuat pengawasan distribusi untuk menghindari spekulasi pasar. - Diversifikasi pemasok untuk menjaga ketersediaan stok.
Efektivitas	Menilai efektivitas kebijakan lokal dalam menjaga harga telur ayam tetap kompetitif dan tidak terlalu membebani masyarakat.	- Harga lebih tinggi dari rata-rata nasional tetapi sejalan dengan provinsi. - Kenaikan harga moderat dibanding wilayah lain di Gorontalo.	- Tingkatkan produktivitas peternak lokal dengan memberikan pelatihan dan insentif. - Optimalkan logistik untuk distribusi yang efisien. - Dorong kolaborasi peternak untuk meningkatkan skala ekonomi.
Relevansi	Menilai sejauh mana harga telur ayam ras di Pohuwato sesuai dengan pola perkembangan harga di tingkat provinsi dan nasional.	- Harga di Pohuwato lebih tinggi dari rata-rata provinsi (Rp30.760) dan nasional (Rp28.220). - Masih di bawah harga tertinggi di	- Fokus pada upaya pengendalian harga agar sesuai daya beli masyarakat lokal. - Integrasikan program stabilisasi harga dengan kebijakan pangan provinsi.

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
		Boalemo (Rp39.560).	- Kembangkan kebijakan produksi yang memperhitungkan kebutuhan lokal dan nasional.

Sumber : Hasil Olahan Data Primer dan Sekunder, 2024

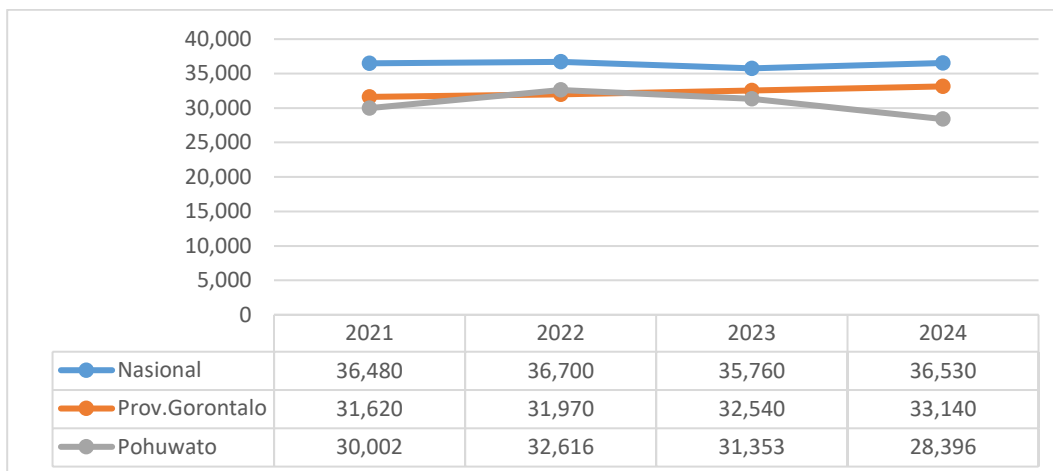
Kabupaten Pohuwato memiliki harga telur yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan sebagian besar wilayah di Gorontalo, menunjukkan perlunya intervensi untuk menurunkan disparitas harga. Dari aspek perkembangan antarwaktu, Fluktuasi harga yang stabil namun cenderung meningkat memerlukan upaya lebih untuk menekan kenaikan harga agar lebih terjangkau bagi konsumen. Kebijakan saat ini telah menjaga stabilitas harga relatif kompetitif dibandingkan wilayah lain, tetapi upaya tambahan diperlukan untuk mengoptimalkan efisiensi dan daya saing lokal. Harga telur ayam ras di Pohuwato relevan dengan kondisi pasar regional, namun tetap perlu pengelolaan lebih baik untuk mendekati harga rata-rata nasional dan mengurangi tekanan pada masyarakat.

Harga Ayam Ras

Salah satu sumber protein hewani dengan harga yang relatif terjangkau dan mudah diperoleh adalah daging ayam ras pedaging atau yang sering disebut sebagai ayam broiler (selanjutnya dipakai istilah ayam broiler). Selain harganya yang relatif lebih terjangkau, daging ayam broiler mudah diolah menjadi berbagai macam masakan sehingga banyak digunakan dalam rumah tangga maupun rumah makan karena dagingnya yang empuk dan tebal. Adapun harga ayam ras di Kabupaten Pohuwato dan di tingkat Provinsi Gorontalo serta Nasional sebagai berikut.

Perkembangan harga ayam ras di Kabupaten Pohuwato selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, harga ayam ras di Pohuwato sebesar Rp30.002, lebih rendah dari Provinsi Gorontalo (Rp31.620) dan nasional (Rp36.480). Pada tahun 2022, harga di Pohuwato meningkat menjadi Rp32.616, mendekati tingkat provinsi (Rp31.970) tetapi masih jauh di bawah harga nasional (Rp36.700).

Pada tahun 2023, harga ayam ras di Pohuwato turun menjadi Rp31.353, sementara di tingkat provinsi dan nasional tetap relatif stabil, masing-masing sebesar Rp32.540 dan Rp35.760. Tren ini berlanjut pada tahun 2024 seperti diperlihatkan pada Gambar 6, dengan harga di Pohuwato menurun lebih tajam menjadi Rp28.396, jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi (Rp33.140) dan nasional (Rp36.530).



Gambar 6. Relevansi Ayam Ras (Rp/1 Ekor = 1,5 Kg) Kabupaten Pohuwato, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional pada Tahun 2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024.

Perbedaan tren ini menunjukkan bahwa dinamika pasar di Pohuwato cenderung lebih fluktuatif dan kurang terintegrasi dengan pola harga di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih adaptif untuk mengelola pasar lokal, seperti penguatan distribusi, dukungan peternak lokal, dan stabilisasi harga, agar dapat mengurangi disparitas dengan harga provinsi dan nasional. Berikut Tabel 4 adalah matriks Analisis Perkembangan Harga Ayam Ras di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 4. Perkembangan Harga Ayam Ras di Kabupaten Pohuwato

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
Posisi Relatif	Posisi harga ayam ras di Kabupaten Pohuwato dibandingkan dengan rata-rata di tingkat provinsi dan nasional.	- Harga Pohuwato 2024: Rp28.396 (terendah di Provinsi Gorontalo). - Rata-rata provinsi: Rp33.140. - Rata-rata nasional: Rp36.530. - Tertinggi: Bone Bolango (Rp35.190).	- Manfaatkan daya saing harga untuk meningkatkan konsumsi lokal. - Pastikan kualitas produk terjaga agar harga rendah tidak mengurangi kepercayaan konsumen. - Tingkatkan efisiensi logistik untuk memperkuat posisi kompetitif.
Perkembangan Time Series	Perubahan harga ayam ras di Kabupaten Pohuwato selama empat tahun terakhir untuk	- 2021: Rp30.002 - 2022: Rp32.616 (tertinggi) - 2023: Rp31.353	- Stabilkan harga melalui kebijakan rantai pasok yang efisien. - Dukung produksi lokal dengan subsidi pakan

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
	memetakan tren fluktuasi dan stabilitas pasar.	- 2024: Rp28.396 (terendah).	dan infrastruktur. - Monitor dinamika pasokan untuk menghindari penurunan harga yang merugikan peternak.
Efektivitas	Menilai efektivitas kebijakan lokal dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan peternak serta keterjangkauan konsumen.	- Fluktuasi signifikan, dari Rp30.002 (2021) hingga Rp28.396 (2024). - Penurunan harga menguntungkan konsumen, tetapi berpotensi mengurangi margin peternak.	- Berikan dukungan langsung kepada peternak untuk menjaga keberlanjutan usaha. - Tingkatkan akses pasar melalui penguatan logistik dan distribusi. - Pastikan kebijakan penurunan harga tetap memperhatikan kesejahteraan peternak lokal.
Relevansi	Keselarasannya dinamika harga ayam ras di Pohuwato dengan tingkat provinsi dan nasional.	- Harga Pohuwato selalu lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. - 2024: Pohuwato Rp28.396 vs Provinsi Rp33.140 vs Nasional Rp36.530.	- Integrasikan kebijakan harga lokal dengan provinsi untuk mengurangi disparitas. - Perkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam pengelolaan distribusi. - Tingkatkan promosi produk lokal untuk daya saing di pasar luar.

Sumber : Hasil Olahan Data Primer dan Sekunder, 2024

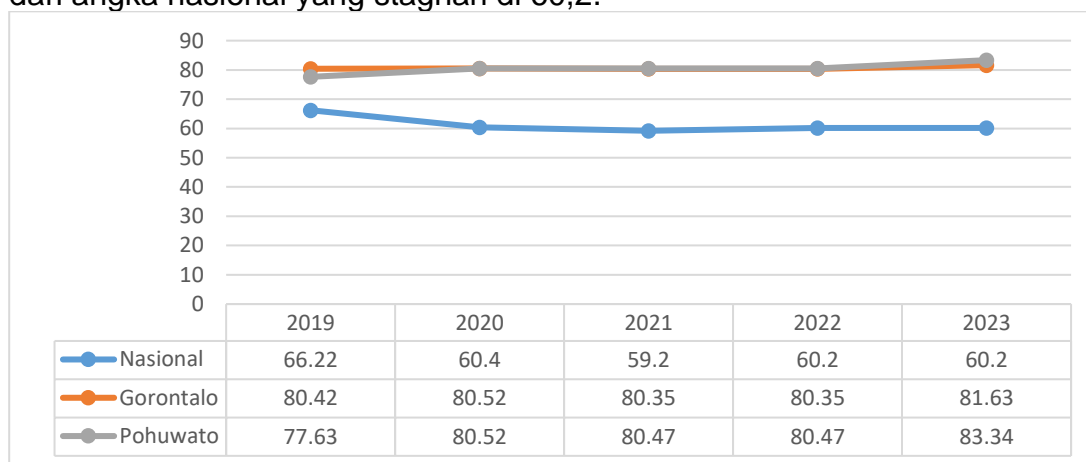
Kabupaten Pohuwato memiliki harga ayam ras yang paling rendah di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dioptimalkan melalui efisiensi distribusi dan penguatan produksi lokal. Harga ayam ras di Pohuwato menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan tajam pada 2024. Penurunan ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen, tetapi pemerintah perlu mencegah dampak negatif bagi peternak. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjaga stabilitas harga sambil melindungi peternak lokal. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan dukungan untuk peternak sangat dibutuhkan. Tren harga ayam ras di Pohuwato yang lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih terkoordinasi untuk mendukung keseimbangan pasar.

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan relevansi data indeks ketahanan pangan Kabupaten Pohuwato dengan tren nasional dan Kabupaten Gorontalo diperlihatkan pada Gambar 7, terlihat bahwa Pohuwato menunjukkan performa yang lebih progresif dan stabil dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pada tahun 2019, indeks Pohuwato berada di angka 77,63, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Gorontalo (80,42) tetapi jauh di atas rata-rata nasional (66,22). Selanjutnya, pada tahun 2020, meskipun Gorontalo stagnan di angka 80,52, Pohuwato berhasil mencatat peningkatan hingga mencapai angka yang sama.

Pada periode 2021-2022, indeks Pohuwato tetap stabil di angka 80,47, hanya sedikit di bawah Gorontalo (80,35) tetapi tetap jauh melampaui rata-rata nasional yang menurun hingga 59,2 pada 2021. Pada tahun 2023, Pohuwato mencatat lonjakan signifikan ke angka 83,34, melampaui Gorontalo (81,63) dan jauh lebih tinggi dari angka nasional yang stagnan di 60,2.



Gambar 7. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019-2023

Relevansi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato berhasil mempertahankan ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan tren nasional dan

kabupaten tetangga. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program atau kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga mampu menghadapi tantangan ketahanan pangan secara lebih efektif dibandingkan wilayah lain. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut ini adalah matriks Analisis Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato.

Tabel 5. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pohuwato

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
Posisi Relatif	Posisi indeks ketahanan pangan Kabupaten Pohuwato dibandingkan dengan provinsi dan nasional.	- Skor Pohuwato 2023: 83,34 - Rata-rata nasional: 60,2 - Posisi kedua di Provinsi Gorontalo setelah Kota Gorontalo (87,59).	- Pertahankan program yang mendukung ketahanan pangan. - Tingkatkan koordinasi antar sektor untuk mempertahankan posisi unggul. - Lakukan promosi sebagai model pengelolaan ketahanan pangan terbaik di tingkat lokal.
Perkembangan Time Series	Tren perkembangan indeks ketahanan pangan di Pohuwato dari 2019 hingga 2023.	- 2019: 77,63 - 2020: 80,52 - 2021-2022: 80,47 (stabil) - 2023: 83,34 (peningkatan signifikan).	- Dorong kesinambungan tren positif dengan investasi infrastruktur pangan. - Beri perhatian lebih pada kebijakan stabilisasi di tahun stagnasi (2021-2022). - Fokus pada peningkatan kualitas akses dan distribusi pangan lokal.
Efektivitas	Evaluasi keberhasilan kebijakan lokal dalam mendukung ketahanan pangan.	- Indeks Pohuwato jauh di atas rata-rata nasional (60,2) dan tertinggi kedua di Gorontalo. - Lonjakan signifikan pada	- Tingkatkan dukungan kepada petani lokal dan pelaku usaha pangan. - Kembangkan sistem logistik yang lebih terintegrasi. - Lakukan evaluasi

Aspek	Penjelasan Aspek	Indikator	Implikasi Kebijakan
		2023 menunjukkan keberhasilan kebijakan.	berkala untuk mempertahankan efektivitas kebijakan dan mencegah stagnasi indeks di masa mendatang.
Relevansi	Hubungan capaian indeks Pohuwato dengan tren nasional dan kabupaten lainnya di Gorontalo.	- 2019: Pohuwato lebih rendah dari Kabupaten Gorontalo (80,42), tetapi lebih tinggi dari nasional (66,22). - 2023: Pohuwato (83,34) melampaui Gorontalo (81,63).	- Pastikan kebijakan lokal relevan dengan tantangan spesifik wilayah. - Tingkatkan sinergi dengan kebijakan tingkat provinsi untuk memastikan keberlanjutan tren positif. - Lakukan benchmarking kebijakan antar daerah.

Sumber : Hasil Olahan Data Primer dan Sekunder, 2024

Dengan skor 83,34, Kabupaten Pohuwato menempati peringkat kedua di Provinsi Gorontalo setelah Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan pengelolaan ketahanan pangan yang sangat baik dan posisi yang strategis sebagai wilayah dengan ketahanan pangan unggul. Perkembangan Time Series: Tren dari 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan, meski ada stagnasi pada 2021-2022. Lonjakan di tahun 2023 menandakan kebijakan atau intervensi yang berhasil memperbaiki berbagai aspek ketahanan pangan.

Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan di Pohuwato tercermin dari performa indeks yang jauh melampaui rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam menjamin stabilitas, aksesibilitas, dan kualitas pangan. Perbandingan tren dengan kabupaten lain dan nasional menunjukkan performa yang lebih progresif di Pohuwato. Kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dimensi ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, stabilitas, serta pemanfaatan pangan yang mencukupi untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, tantangan terbesar terletak pada akses dan keterjangkauan pangan. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara layak. Kondisi ini menyebabkan tingginya prevalensi gizi buruk, kerawanan

pangan, serta penurunan produktivitas yang secara keseluruhan memperburuk siklus kemiskinan.

Di Kabupaten Pohuwato, meskipun indeks ketahanan pangan mencatat skor yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, tantangan kemiskinan dalam dimensi ini tetap signifikan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas distribusi pangan, menghadapi risiko tinggi terhadap kerawanan pangan. Harga pangan yang fluktuatif, ketersediaan yang tidak merata, serta minimnya infrastruktur distribusi menjadi faktor penyebab utama yang memperburuk masalah ini. Selain itu, keterbatasan pendidikan dan informasi tentang pentingnya gizi yang seimbang juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat miskin, yang sering kali mengandalkan pangan murah namun kurang bergizi.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan program-program yang langsung menyasar kelompok rentan. Subsidi pangan dan program bantuan langsung tunai bagi rumah tangga miskin dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan akses pangan mereka. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha kecil, dan pendampingan produksi lokal. Dengan langkah ini, masyarakat miskin dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat lokal.

Dari sisi distribusi, investasi pada infrastruktur sangat diperlukan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, pasar lokal, serta gudang penyimpanan yang memadai akan membantu memperlancar distribusi pangan, menekan biaya logistik, dan mengurangi disparitas harga antar wilayah. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga pangan melalui regulasi yang mendukung efisiensi rantai pasok, serta pengawasan terhadap spekulasi harga yang sering kali merugikan kelompok miskin.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dalam dimensi ketahanan pangan. Sektor pertanian perlu diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas, terutama melalui dukungan kepada petani kecil dalam bentuk subsidi pupuk, akses teknologi, dan pelatihan. Kolaborasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang bergizi. Program pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah, misalnya, dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi dampak buruk kemiskinan terhadap gizi anak-anak.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menangani dimensi ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan nasional.

IV. KESIMPULAN

Ketahanan pangan merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, khususnya di daerah seperti Kabupaten Pohuwato yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Harga bahan pangan utama, seperti beras, telur, dan ayam ras, serta produktivitas padi sebagai komoditas strategis, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga beras yang kompetitif di Pohuwato, misalnya, menunjukkan potensi daerah ini untuk menjaga akses pangan yang terjangkau bagi kelompok rentan. Namun, fluktuasi produktivitas padi dari tahun ke tahun memerlukan intervensi yang lebih konsisten, seperti penyediaan benih unggul dan perbaikan irigasi, guna memastikan keberlanjutan pasokan pangan lokal. Di sisi lain, tingginya harga telur di Pohuwato menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Harga yang jauh di atas rata-rata nasional mencerminkan inefisiensi distribusi atau tingginya biaya produksi, yang berpotensi membatasi daya beli masyarakat miskin. Sebaliknya, harga ayam ras yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain membuka peluang untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui ekspansi pasar dan penguatan usaha peternakan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan peternak kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, prioritas intervensi di bidang kemiskinan dan ketahanan pangan harus difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi, stabilisasi harga pangan, dan diversifikasi pasar. Langkah-langkah ini mendesak untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Intervensi yang tepat akan memperkuat ketahanan pangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam penurunan kemiskinan sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dari aspek persentase penduduk miskin, memahami tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato dari 18,16% pada 2019 menjadi 17,11% pada 2024 dapat memberikan gambaran keberhasilan program sosial yang ada. Namun, tingkat kemiskinan yang masih jauh di atas rata-rata nasional (9,03%) menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan keterbatasan inklusi sosial, yang harus diatasi untuk mengurangi disparitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional, 2024.
- Boby R. Payu, Rezkiawan Tantawi. (2024). *Peluang dan Tantangan Pencapaian SDGs di Kabupaten Pohuwato. Jejak Menuju Keberhasilan Pengembangan Kawasan Ekonomi Wilayah Teluk Tomini*. Tahta Media Group.
- BPS Kabupaten Pohuwato, 2024
- Huraerah, Abu. (2005). "Strategi Penanggulangan Kemiskinan," *Paradigma. Polistaat Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 168-171
- Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019-2023
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

- Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 120/25/III/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pengelolaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pohuwato.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Akhir Tahun 2022
- Setyo Budiantoro Luhur Fajar Martha Muto Sagala. 2025. Penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014. Prakarsa
- Syawie, Mochamad (2011). "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial." Informasi 16(03)
- Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Pohuwato.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato tahun 2012-2032
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2024
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kesmkinan Daerah
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan pemerintah Prioviinsi Gorontalo dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2021
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2024
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi. Ekonomi dan Studi Pembangunan, 9
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato 2025-2045
- Sutikno,S,. Soedjono,E.S., Rumiati, A.T., & Trisunanrno, L. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Masalah Ekonomi danPembangunan.Vol.11(1). <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1339>
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. (2022). Panduan Penyusunan Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2011. Panduan Penanggulangan Kemiskinan. Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK). (2010). Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat Menurut Provinsi. Deputi Seswapres BidangKesejahteraan Rakyat dan TNP2K Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K